

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masyarakat Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir belum merasakan dampak yang signifikan dari regulasi yang ada. Belum meratanya pembentukan Destana/Katana di wilayah Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan banyak desa yang belum mandiri dalam menangani banjir. Kurangnya koordinasi antar OPD-OPD terkait yang mengakibatkan tumpang tindih kebijakan.
2. Sumber daya yang belum memadai baik pada sumber daya manusia, anggaran, dan material BPBD Kabupaten Tangerang dalam penanggulangan banjir.
3. Hubungan antar organisasi yang dilakukan sudah cukup baik dalam segi komunikasi dengan OPD-OPD terkait, swasta, pendidikan yang bergerak dalam bidang kebencanaan. Namun komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat desa pesisir belum optimal karena komunikasi hanya dilakukan sampai dengan pemerintah desa. Belum optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban baik dari pemerintah daerah (BPBD) dan pihak pengembang (PT. Agung Sedayu Grup).
4. Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini BPBD Kabupaten Tangerang belum dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan belum ada sinergitas antara BPBD dengan masyarakat terkait upaya mitigasi bencana.
5. Kecenderungan pelaksana (disposisi implementor) dalam hal ini BPBD Kabupaten Tangerang sudah dapat memahami isi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun perlu adanya realisasi pengembangan dan penguatan terhadap mitigasi bencananya.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik belum berjalan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kondisi sosial masyarakat di 2 (dua) desa pesisir, selain itu belum adanya tindak lanjut dari pengembang atas kondisi ekonomi yang terhambat akibat banjir, dalam hal ini dikarenakan adanya pembangunan reklamasi.

## 6.2. Saran

Dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Tangerang Selatan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan lagi. Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penulisan ini fokus utamanya adalah penanggulangan banjir di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Dimana pemerintah bersama Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi untuk membuat perencanaan pencegahan penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang secara terintegrasi.
2. Perlunya kejelasan wewenang dan tugas antara *stakeholders* yang ada di daerah dengan *stakeholders* yang ada dipusat.
3. Perlu adanya program dan kegiatan lebih lanjut yang dilakukan oleh BPBD, OPD terkait, pihak swasta, pemerintah desa, dan masyarakat.